

# Konflik dan Ide Jurnalisme Perdamaian

Oleh: Stanley<sup>1</sup>

Pengertian tentang kata “SARA” lahir dari konsep pendekatan keamanan dan stabilisasi politik Orde Baru. Lewat media massa, pihak Deppen mengembangkan larangan untuk meliput hal-hal yang berbau suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

SARA sendiri, terutama “antar golongan” pada hakekatnya adalah sebuah pengertian yang (masih) membingungkan. Apalagi pada jaman Orde Baru ketentuan larangan memberitakan masalah SARA ditambah dengan sejumlah ketentuan lain seperti larangan memberitakan bisnis dan skandal *the first famili* dan konflik elit politik.

Masyarakat dunia lebih mengenal SARA sebagai sebuah konflik etnik atau konflik agama saja. Atau juga keduanya sekaligus. Kita bisa mencatat sejumlah peristiwa yang muncul ke permukaan, misalnya masalah Bask di Spanyol dan konflik Tamil-Sinhala di Srilangka (masalah etnik), masalah Irlandia di Inggris Utara (masalah agama), kerusuhan LA (masalah diskriminasi ras) dan lain-lain.

Dan sejumlah contoh tersebut jelas tak ada kategori “antar-golongan” atau pun suku. Antar golongan bisa diartikan sebagai antar-kelas sosial. Pengertian suku sebetulnya telah masuk dalam unsur “etnis”. Namun demikian konflik yang memiliki potensi melebar jadi konflik berskala besar tak lain adalah konflik yang melibatkan keyakinan agama. Kita bisa melihat sejumlah contoh “klasik” konflik jenis terakhir ini antara lain dalam peristiwa “Perang Salib”, terbentuknya “Negeri Bangladesh”, “Konflik di Belfast” dan lain-lain.

Bagaimana dengan Indonesia? Ragam bangsa Indonesia terlalu banyak dan rumit. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki 656 suku bangsa yang menyebar dari wilayah Sabang hingga Merauke. Berbagai suku bangsa ini mendiami 30 ribu pulau dan kepulauan yang satu sama lainnya dipisahkan lautan dan pegunungan. Itu baru dari segi etnik, belum lagi agama di mana “negara” mengakui ada 5 agama resmi. Para pendiri bangsa membingkai keragaman yang ada dalam Nusantara ini dengan kata-kata “ajaib” Bhinneka Tunggal Ika yang artinya “berbeda-beda tapi satu”.<sup>2</sup>

## Potensi Liputan Dalam Memperhebat Konflik

Pers dilarang memberitakan hal-hal yang berbau SARA dengan anggapan bahwa pemberitaan oleh pers akan kian memperhebat sebuah peristiwa “kriminal” kecil menjadi sebuah konflik besar. Betulkah asumsi ini?

Tak gampang menjawabnya. Acapkali para penguasa selalu menuding pers sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas melebarnya sebuah pertikaian SARA. Tapi sebaliknya, pers menyatakan dirinya justru berkewajiban untuk mengurangi parahnya sebuah konflik SARA dengan cara memberitakannya secara gamblang dan jelas. Mana yang benar? Penguasa Amerika pernah menuding penulis Harriet Stowe sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas munculnya konflik kulit putih versus kulit hitam yang diakibatkan bukunya tentang penderitaan warga kulit hitam yang berjudul “*Uncle Tom’s Cabin*”. Benarkah sebuah karya sastra bisa mengobarkan sebuah perang besar?

---

<sup>1</sup>Dibuat untuk keperluan *Seminar “Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai”* yang diadakan Yayasan Kippas di Hotel Danau Toba International, Medan, pada 19 April 2001

<sup>2</sup>Motto ini bukan satu-satunya milik negara-bangsa Indonesia. Negara Amerika Serikat yang berdiri 171 tahun sebelum Indonesia merdeka menggunakan motto “*e pluribus unum*” yang maknanya sama. Bukan hanya itu kesamaan antara dua negara. Bila AS menggunakan simbol burung “rajawali” maka Indonesia menggunakan lambang burung “garuda”. Motto “Bhinneka Tunggal Ika” di masa lalu, digunakan penguasa sebagai lambang keberhasilannya dalam menciptakan dan memelihara “harmoni” dalam kehidupan rakyatnya. Sejumlah simbol diproduksi untuk hal tersebut. Mulai dari pembangunan rumah ibadah yang berbeda secara berdampingan, pembentukan berbagai “Barisan Bhinneka Tunggal Ika”, hingga pembangunan Taman Mini Indonesia Indah.

Absurd memang. Tapi kita juga tahu bahwa pemberitaan media massa tentang pembantaian warga Madura oleh orang-orang Dayak di Kalimantan Barat beberapa pada 1997 yang kini terulang di Kalimantan Tengah, telah membuat sejumlah warga Madura memutuskan untuk mengirimkan sukarelawan berani mati ke Kalimantan Barat. Ini adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri.<sup>3</sup>

Barangkali kita juga masih ingat bagaimana terminal kampung Rambutan di Jakarta pada 1999 kosong selama sehari-hari akibat perang besar antara warga Sumatera Utara dan warga Jawa Barat. Penyebabnya sendiri sebetulnya sepele yaitu ada kawanan pencopet yang beraksi di sebuah bus Mayasari yang tengah meluncur. Seorang ibu-ibu yang jadi sasaran pencopet berteriak-teriak minta tolong. Awak bis segera menghentikan kendaraannya dan menangkap kemudian memukuli sang pencopet beramai-ramai. Singkat cerita, kawanan pencopet tak terima. Mereka mencegat semua bus Mayasari dan melemparinya dengan batu, salah seorang sopir Mayasari bahkan tewas ditikam kawanan pencopet yang ketap mangkal di sebuah perkampungan depan terminal. Tak ayal, para awak bus Mayasari melakukan aksi solidaritas dengan menggempur kawasan tempat tinggal para pencopet. Hasilnya, terjadilah perang antara warga Batak versus warga Sunda.

Demikian juga, reaksi yang bermunculan setelah mediamassa memberitakan 3 perwira polisi di Ambon (1 Maret 1999) menembak mati warga Dusun Rinjani yang sedang sholat subuh di Mesjid Muhajirin. Pemberitaan ini mengundang demonstrasi ribuan orang yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Sejumlah partai politik Islam melancarkan kutukan. Bahkan, konon sebuah partai politik mengirimkan pasukan jihad ke Ambon. Pihak polisi sendiri melalui Kadispen Mabes Polri, Brigjen (Pol) Togar M Sianipar, keesokan harinya membantah aparatnya menembaki warga yang tengah sholat subuh di mesjid. Togar menyatakan aparatnya hanya mencoba meleraikan pertikaian antara warga Dusun Kolan Aruhu dengan warga Dusun Rinjani yang menggunakan senjata tajam dan bom ikan. "Tembakan terpaksa dilepaskan untuk meleraikan dan menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi," ujar Togar.

Mana yang benar? Togar, celaknya adalah anggota ABRI yang citranya sedang melorot drastis dan seorang Kristen yang netralitasnya diragukan. Ia dianggap berkepentingan membela aparat yang melakukan penembakan tersebut (yang juga adalah orang Kristen). Dua wartawan yang mengasuh *talkshow* di sebuah Radio Trijaya FM di ibukota, secara "tajam" menyatakan perbuatan tersebut hanya bisa dimengerti dalam rangka berpikir ala Yahudi. Tentu saja, banyak pendengar bertanya-tanya, apa hubungan antara ABRI dan Yahudi?

Banyak pengamat pers menyatakan pemberitaan sejumlah mediamassa soal kerusuhan Ambon sudah keluar dan proporsi dan cenderung mengobarkan kerusuhan yang lebih besar. Hal ini juga membuat galau Menteri Agama Malik Fajar pada Desember 1999 hingga ia perlu menegaskan bahwa kerusuhan di Ambon bukan perang antar-agama. "Saya mengingatkan semua pihak untuk jangan menggiring persoalan di Ambon itu menjadi konflik antar-agama. Bila persoalan Ambon dibawa menjadi konflik antar-agama, penyelesaiannya akan semakin sulit, dan wilayah konflik akan semakin luas. Bangsa ini akan semakin tercabik-cabik dan kita tak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya," ujar Menteri Agama.

Apa yang bisa kita lihat sekarang di Ambon? Realitas psikologis, opini dan persepsi saling campur aduk menyeret kecamuk Ambon ke dalam tragedi yang tak berkesudahan.

## **Potret Pers Indonesia Meiput Konflik**

---

<sup>3</sup>Media yang paling disorot dalam hal ini adalah tabloid *Bangkit*, yang diterbitkan oleh kelompok Grup harian Surya (patungan Grup Pos Kota dan Grup Kompas-Gramedia). Lihat: "Warga Madura Siap Perang!" dalam *Bangkit No 031 Th 1, 26 April – 2 Mei 1999*. Bandingkan juga dengan aksi perusahan pasca tayangan Dialog Interaktif RCTI yang menayangkan Gubernur Aspar Aswin, pengusaha Ondang Sapta dan pengamat Dr Didi Rachbini. Warga Melayu Kalbar menilai lontaran D0idek pada acara tersebut memojokkan Gubernur Aswin dan warga Melayu. Akibatnya, mereka langsung mematikan acara tersebut dan mengambil senjata kemudian menyerang perkampungan warga Madura di sepanjang Sungai Raya.

Bisa dikatakan pers Indonesia tak punya pengalaman dalam meliput konflik yang melibatkan pertentangan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Selama 32 tahun masa Orde Baru, pers dilarang memberitakan semua hal yang berhubungan dengan SARA. Meski era Orde Baru telah berlalu pers belum mampu dan tak punya strategi untuk menurunkan liputan mengenai konflik yang mengandung unsur SARA.

Mencermati pemberitaan mediamassa menyangkut konflik habis-habisan di Maluku akan ada beberapa hal menarik yang didapat. Berbeda dengan sejumlah media yang militansinya telah dikenal, seperti *Hidayatullah*, *Media Dakwah dan Sabilli*,<sup>4</sup> media besar dan macam Kompas dan *Suara Pembaruan* cenderung melakukan swasensor secara berlebihan yang cenderung menyembunyikan konflik. Sedangkan koran lainnya, *Republika*, cenderung mempertajam konflik. Dengan demikian tak ada satupun media yang menempatkan dirinya sebagai bagian dan proses penyelesaian konflik.

Pada awal 1999, ketika konflik di Maluku mulai pecah, *Republika* masih menunjukkan sikap hati-hati. Namun secara perlahan *Republika* bersimpati pada kelompok Islam. Dalam pandangan *Republika*, kasus Ambon adalah bagian dan upaya kelompok Kristen untuk membasmi kelompok Islam. Islam ditempatkan sebagai kelompok yang selama ini menjadi korban dan bulan-bulanan kekejaman Kristen. Meski Ambon selama ini adalah ladang peperangan, yang menjadi korban dalam peperangan adalah umat Islam, yang dari segi jumlah penduduk dan perlengkapan persenjataan kalah jauh dibandingkan kelompok Kristen.<sup>5</sup>

Dengan menempatkan keseluruhan konflik dalam bingkai ini, *Republika* menempatkan diri pada salah satu kelompok yang bertikai, yakni kelompok Islam. Ada beberapa karakteristik pemberitaan *Republika* sehubungan dengan kerusuhan Ambon. Antara lain *Republika* menampilkan kasus Ambon dalam ruang dan waktu yang tertutup. Sebab dan akibat yang dirunut hanya terbatas pada arena konflik serta mencari siapa yang lebih dulu menyerang. Karenanya, penyebab konflik Ambon tidak ditarik dalam perspektif sejarah, tapi hanya dilihat dalam saat kejadian. Dengan orientasi pemberitaan seperti itu, yang utama muncul adalah siapa yang menyerang dan siapa yang diserang lebih dahulu.

Berita *Republika* juga membuat demarkasi antara “kita” dengan “mereka,” antara Islam dengan Kristen. Jika disebutkan sebagai demarkasi, pembedaan ini bukan hanya sebatas menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, melainkan lebih jauh ingin dikatakan: kita begini, mereka begitu. Di sini suara dan empati tidak diberikan kepada semua pihak. Pihak “kita” diberitakan dengan baik, dengan empati besar bahwa pihak korban adalah kelompok Islam. Korban di pihak Kristen bukan hanya tidak mendapat empati tapi juga tidak mendapat tempat dalam pemberitaan. Pendeknya “kita” baik dan “mereka” buruk.

Selain itu, *Republika* melihat “mereka,” yakni kelompok Kristen, sebagai masalah, selain harian ini juga memfokuskan siapa yang menang dan siapa kalah perang. Di sini bukan konflik itu yang jadi perhatian atau hikmah dan konflik; tapi “mereka” atau kaum Kristen dianggap menjadi sumber masalah dan keseluruhan petaka Maluku. Seperti juga banyak liputan mengenai perang, orientasi pemberitaan semacam ini adalah adanya pemenang dan pecundang, serta mengabaikan adanya inisiatif perdamaian dan antikekerasan yang mungkin muncul.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Tulisan-tulisan ketiga media Islam ini dikenal garang dan menghantam kelompok non-Islam. Dalam kasus Maluku, ketiganya lebih menyuarakan kepentingan kelompok yang menyuarakan Parang Jihad.

<sup>5</sup>Seluruh kajian tentang Maluku ini sepenuhnya diambil dan Eriyanto & Muhammad Qodari, “Mempertimbangkan Jurnalisme Perdamaian” dalam jurnal *Pantau* Edisi 09/Tahun 2000. Lihat juga Muhammad Qodari, “Minimnya pemberitaan Versi Kristen”; Eriyanto, “*Kompas* dan *Suara Pembaruan* Minus Konflik SARA”; Agus Sudibyo, “*Republika* Antusias Memberitakan seruan Jihad”, *ibid*.

<sup>6</sup>*Republika* misalnya mengesampingkan gagasan Gus Dur agar masalah Ambon diselesaikan sendiri oleh masyarakat setempat. Gagasan Gus Dur beranjak dengan asumsi agar masalah Ambon dilokalisasi, sementara pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan sendiri masalahnya. Dalam pemberitaannya, *Republika* banyak mengkritik hal ini yang dipandang sebagai bukti dan ketidakseriusan Gus Dur dalam menyelesaikan masalah Ambon. Asumsi *Republika* mungkin benar, tapi aspek lain seperti upaya agar masyarakat menyelesaikan sendiri masalahnya tidak dilihat – bahkan diabaikan – *Republika*.

*Republika* banyak menonjolkan jatuhnya korban fisik. Pembunuhan, jumlah korban terbunuh, kerugian material, dan sebagainya. Kekerasan nonfisik, seperti adanya trauma perang di kalangan masyarakat dan kerusakan pada struktur budaya masyarakat, tak mendapat tempat yang memadai.

Berbeda dengan *Republika*, *Kompas* dan *Suara Pembaruan* justru memainkan peran berseberangan. *Kompas* dan *Suara Pembaruan* justru berusaha menenggelamkan kasus ini. Kedua media ini memandang kasus Ambon sebagai konflik sosial biasa, yang tidak perlu dirembetkan ke masalah agama. *Kompas* dan *Suara Pembaruan* memang tidak secara sengaja dan jelas mempunyai kebijakan untuk menenggelamkan kasus Maluku dan pemberitaan; namun dengan penghalusan dan pengaburan informasi, akibatnya masalah Maluku tidak bisa transparan ketika diterima khalayak.

Ada beberapa karakteristik bagaimana peristiwa Maluku diberitakan *Kompas* dan *Suara Pembaruan*. Yaitu keduanya selalu mencoba menutup-nutupi informasi dengan mengaburkan masalah bahwa kasus Ambon hanya pertikaian antarwarga yang tidak berhubungan dengan masalah agama. Pengaburan ini bukan hanya pada penyebab konflik, tapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan cara seperti itu, *Kompas* dan *Suara Pembaruan* ingin terlihat aman dan kemungkinan protes pihak-pihak yang terlibat konflik. Akibatnya, relitas tidak dapat diberitakan apa adanya.

Selain itu, *Kompas* dan *Suara Pembaruan* sedikit memberitakan versi atau suara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dua media ini lebih banyak menampilkan sumber-sumber resmi. Ini mungkin cara dan strategi *Kompas* dan *Suara Pembaruan* agar pemberitaannya tidak dinilai menyuarakan salah satu kelompok yang bertikai.

Kecenderungan semacam ini bukan diperuntukkan agar *Kompas* dan *Suara Pembaruan* netral, tapi hanya strategi agar posisinya aman dan kemungkinan protes pihak yang terlibat yang tidak puas atas pemberitaan. Dengan cara seperti ini, realitas konflik agama tidak muncul dalam pemberitaan.

*Kompas* dan *Suara Pembaruan* juga cenderung menghaluskan fakta yang berhubungan dengan peristiwa dan pihak-pihak yang bertikai. Penghalusan ini mungkin tak dimaksudkan *Kompas* dan *Suara Pembaruan* sebagai kesengajaan mengecilkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, meskipun akibatnya sama. Karena tidak ingin terjebak dalam pertentangan kelompok dan pendukung Islam ataupun Kristen, baik *Kompas* maupun *Suara Pembaruan* menampilkan sisi lain, yang justru mengaburkan esensi dan permasalahan Ambon.

*Republika*, *Kompas*, *Suara Pembaruan*, dan *Pos Kota* mempunyai orientasi yang berbeda ketika memberitakan kasus Ambon. Ini tidak dapat dilepaskan dan bagaimana posisi ekonomi politik media tersebut dan bagaimana masing-masing media memandang kasus Ambon secara keseluruhan. *Republika* – sebagai media Islam – berusaha menyuarakan dan “membela” kepentingan Islam dalam konflik Ambon.

Meski dikenal dekat dengan kelompok masyarakat Kristen, *Kompas* dan *Suara Pembaruan* tidak serta merta menjadi pembela kelompok Kristen. Kedua koran ini hidup dalam masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Karena itu mereka tidak mencoba menjadi pembela Islam atau Kristen. Yang mereka lakukan adalah menciptakan harmoni, menjaga jarak antara pihak-pihak yang tengah bertikai. Dengan cara seperti ini, realitas konflik agama menjadi tenggelam dan tidak muncul dalam pemberitaan.

Baik praktek *Republika* maupun *Kompas* dan *Suara Pembaruan* sama-sama tidak menguntungkan dalam upaya menyelesaikan kasus Ambon. Sebagai pemertajam isu, media dapat memprovokasi khalayak. Pemberitaan media yang memusatkan pada jumlah korban dan kekejaman satu kelompok dapat menggiring kemarahan khalayak, bukan hanya mereka yang berada di medan peperangan tapi juga yang berada di luar arena.

Sebaliknya, yang dilakukan *Kompas* dan *Suara Pembaruan* juga tidak mendidik khalayak. Dengan menenggelamkan kasus, dengan memberitakan seolah-olah kasus Ambon bukan masalah agama, khalayak tidak diajak kritis agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

Dalam pemberitaan kasus Ambon, tidak ada media yang memposisikan diri sebagai penyelesaian konflik. Selama Orde Baru media tidak pernah secara telanjang dihadapkan dengan kerusuhan agama

yang demikian besar, luas, panjang, dan melibatkan emosi pemeluk agama Islam dan Kristen. Media lantas terlihat gamang. Kegamangan yang bukan hanya bersumber dan kebingungan bagaimana harus menempatkan diri di tengah konflik agar tidak meluas, tapi juga bingung untuk menempatkan media itu di antara khalayak agar tetap bertahan. Jadinya, yang muncul hanya dua alternatif: terlibat dan memihak atau menghindarkan diri dari konflik.

### **Pers Sebagai Alat Propaganda**

Kerusuhan di Los Angeles, Amerika, pada 29 April 1992 mengukuhkan pemahaman bahwa pers memiliki potensi dahsyat untuk meng"gerak"kan massa, sekaligus meredamnya.<sup>7</sup> Di tangan pemerintah, partai atau kelompok orang tertentu, pers bisa jadi alat propaganda yang efektif.

Contoh yang baik penggunaan media sebagai alat propaganda adalah saat terjadi Perang Malvinas.<sup>8</sup> Saat itu junta militer yang berkuasa di Argentina meminta agar para pemimpin redaksi media massa Argentina memberitakan "kemenangan" pasukan Argentina melawan tentara Inggris yang notabene memiliki peralatan lebih canggih dengan ditambah kekuatan resimen Gurkha-nya. Hal ini untuk mendorong para pemuda agar mau masuk menjadi milisi sukarela serta meningkatkan semangat tempur pasukan Argentina yang mulai kehilangan motivasi. Padahal kejadian di lapangan adalah sebaliknya. Pasukan Argentina babak belur dihajar Gurkha dan tentara Inggris. Bahkan banyak di antara mereka yang lari begitu melihat Gurkha menghunus kukri.

Di pihak Inggris lain lagi. Saat ada dua pesawat Sea Harrier tertembak, PM Margareth Thatcher mengimbau agar Radio BBC tak memberitakannya. Direktur BBC secara menyampaikan protes dan menyatakan niatnya untuk tetap menyiarkannya. Teatchen tak mau kalah dan mengancam akan memnghentikan subsidi pemerintah pada Radio BBC. Yang terjadi kemudian adalah BBC mengumumkan ancaman Thatcher sambil tetap menyiarkan berita tertembaknya pesawat canggng Inggris itu. Siaran BBC ini mengundang reaksi rakyat Inggris dan anggota parlemen yang kemudian melancarkan kemungkinan mempersoalkan pelanggaran atas upaya menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur.

Ada banyak contoh lain, bagaimana media dijadikan sebagai alat propaganda untuk menyerang dan menjatuhkan pemerintah. Demikian juga ada banyak penguasa yang menggunakan media untuk melanggengkan kekuasaannya.<sup>9</sup>

Kekuatan pers antara lain melalui proses pemingkiaan (*framing*), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan angle, penambahan atau pengurangan foto dan gambar dan lain-lain. Dengan demikian, sebetulnya media punya potensi untuk jadi peredam atau pun pendorong konflik.

---

<sup>7</sup> Kerusuhan bermula dan terungkapnya penganiayaan berat empat polisi kulit putih terhadap seorang warga kulit hitam, mantan napi bernama Rodney King (26) pada 3 Maret 1992 malam waktu setempat. Akibat penganiayaan dengan sebab-sebab tak jelas, kecuali karena kebencian atas perbedaan warna kulit itu, Rodney King bukan hanya mengalami kerusakan wajah namun ia juga gegar otak dan tulang pipinya hancur. Rupanya adegan penganiayaan itu sempat direkam dengan *handycam* oleh seorang saksimata. Lantas rekaman itu diberikan pada hakim pengadilan yang menggelar kasus penganiayaan tersebut. Akibatnya masyarakat kulit hitam dan kaum hispanik marah dan muncullah kerusuhan rasial diikuti aksi penjarahan di hampir seluruh kawasan kota selama tiga hari yang menewaskan 55 orang, 2.383 orang dirawat di rumah sakit dan 13.500 orang ditahan dengan tuduhan terlibat dalam aksi kekerasan. Total kerugian material mencapai lebih dan US\$ 800 juta dan 10 ribu pusat bisnis hancur total.

<sup>8</sup> Inggris menyebutnya sebagai Perang Falkland.

<sup>9</sup> Contoh yang menarik untuk dikemukakan adalah Julius Caesar yang bukan hanya menaklukan dan mempertahankan bujukannya pada para pemimpin propinsi dan pemimpin perang melalui kekuatan militer semata tapi juga menjalankan politik pencitraan melalui sejumlah alat propaganda. Selain pers menggunakan berbagai parade, kemegahan dan upacara-upacara. Walau sesunggu ahli bercerita, Ia sengaja membesar-besarkan mitos yang menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan Dewa. Ia juga menggunakan slogan yang hebat-hebat macam "Veni, Vidi, Vici" (saya datang, saya lihat, saya menang). Ia juga mencetak wajahnya dalam semua koin uang yang beredar di wilayah kekaisarannya untuk mengingatkan setiap musuh dan saingannya bahwa dia lah satu-satunya penguasa Romawi. Lebih jauh soal digunakannya media sebagai alat propaganda bisa dilihat pada James E Combs & Dan Nimmo, *Propaganda Baru*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.

Media bisa memperjelas sekaligus mempertajam konflik atau sebaliknya: mempengaburkan dan mengeliminirnya. Media bisa merekonstruksi realitas, tapi juga bisa menghadirkan hiperealitas.

Secara teoritis, ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik.<sup>10</sup> Yaitu sebagai *issue intensifier* dimana media berposisi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Isu yang diangkat media akan memunculkan dan menampakkan dimensi isu secara tajam. Dengan posisi sebagai intensifier, media mem-*blow up* realitas yang jadi isu sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan. Lainnya adalah sebagai *conflict diminisher*, yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis.

Selain itu, media juga bisa berfungsi jadi pengarah *conflict resolution*, yakni media menjadi mediator dengan menampilkan isu dan berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Dengan peliputan media, pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap dasar yang terbentuk semula.<sup>11</sup>

Masalah SARA adalah sebuah hal yang masih asing bagi pers Indonesia. Masih banyak wartawan yang merasa kikuk bila harus meliput persoalan ini. Hal ini bisa dimengerti mengingat wartawan selama puluhan tahun terlanjur tak terbiasa dengan pola penyelidikan (*investigation*). Wartawan Indonesia juga sama sekali tak mengenal *provetic journalism* sebagaimana diterapkan para wartawan di negara maju. Dalam meliput konflik, wartawan lebih banyak mengutip ucapan pejabat (sipil maupun militer) dan data resmi yang disodorkan aparat negara.<sup>12</sup>

Yang jadi pertanyaan adalah apa salahnya jurnalisme “asal-asalan” atau “jurnalisme omongan (pejabat)”? Sejauh mana pengaruh media pada masyarakat? Benarkah media memiliki kekuatan yang mampu mempersuasi dan mengajak kelompok masyarakat untuk bertindak? Tindakan macam apa yang bisa dilakukan pembaca sebuah media yang penuh dengan informasi bias?

### **Ampuhnya Jurnalisme Omongan<sup>13</sup>**

Ada banyak wartawan berpendapat jurnalisme omongan sesungguhnya adalah sama dengan jurnalisme bohong. Setiap kali ada kerusuhan di Indonesia, aparat keamanan yang dimintai konfirmasi selalu cepat-cepat menjawab “keadaan sudah kembali aman, lancar dan terkendali”. Padahal pada kenyataannya, kerusuhan sama sekali belum bisa di”kendali”kan. Demikian juga sebelum jajak pendapat di Timor Timur, setiap kali memberikan konfirmasi perihal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau terjadinya aksi penembakan oleh ABRI, setiap sumber Departemen Luar Negeri yang memberikan konfirmasi kepada wartawan adalah sumber kebohongan.

Kaidah pers “*big name big news, no name no news?*” dalam paradigma wacana media di Indonesia, khususnya yang menyangkut pejabat, adalah mesin produksi berbagai anti-realitas. Contoh

---

<sup>10</sup> Andrew Arnow seperti dikutip Nunung Prajarto, *Media Berita dalam Sebuah Konflik*, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1993, h. 2-6. Dalam konteks pemberitaan yang berhubungan dengan SARA/rasial, lihat tulisan Peter Braham, “How the Media Report Race”, dalam Michael Gurevitch, Tony Bennett, James Curran and Janet Woollacott (ed), *Culture, Society and the Media*, London and New York, Methuen, 1982, h. 268-286. Dalam tulisan tersebut, Braham di antaranya menyebut beberapa kecenderungan media ketika memberitakan peristiwa rasial, yang dipandang sensitif. Ada kecenderungan media untuk memperbesar, tapi ada juga yang berusaha menutupi dan mencari harmoni dibandingkan memberitakan secara sebenarnya.

<sup>11</sup> Lihat: Robert Karl Manoff, “The News Values of Peace Journalism” dalam *The Peace Journalism Option, January’ 1998*. Juga Eriyanto & Muhammad Qodari, *loc cit*.

<sup>12</sup> Pengamat media menyatakan para wartawan di Indonesia lebih banyak mempraktekkan talking journalism, yaitu jurnalisme omongan yang lebih merupakan kutipan atas pernyataan seorang pejabat dan counter pakar atas pernyataan tersebut, atau sebaliknya.

<sup>13</sup> Bagian ini saya ambil dan paper saya untuk *Workshop on Violence in Indonesia to follow the Asian Studies Association of Australia (ASA) Conference* di Universitas Melbourne, Melbourne, Australia, pada 3-9 Juli 2000. Lihat Stanley, “The Potential of the Media as an Extinguisher and a Spur for Acts of Violence”.

ekstrem yang bisa dikemukakan di sini adalah pada 1970-an saat Presiden Soeharto berpidato menyatakan bahwa Indonesia telah bebas buta huruf, pers keesokan harinya memuatnya pernyataan ini sebagai *headline* dan tak pernah melakukan konfirmasi pada jutaan rakyat yang masih buta huruf.<sup>14</sup> Dengan bantuan media, ucapan presiden yang tadinya baru bertaraf “pernyataan” diubah menjadi “kenyataan”.<sup>15</sup> Upaya mengubah paradigma pernyataan-kenyataan ini didukung dengan diwajibkannya setiap desa membuat slogan “Daerah Kami Bebas-3B”.<sup>16</sup>

Dengan adanya kebiasaan pejabat untuk menutupi fakta sebenarnya, maka pers terbiasa mengutip kebohongan. Hal ini terlanjur jadi sesuat yang lumrah. Apalagi ada kewajiban dalam pers untuk menyajikan liputan secara berimbang (*cover both side*). Liputan penyediaan dan pengumpulan data di lapangan bisa dimentahkan dengan bantahan dari pejabat yang apabila diturunkan akan mengundang risiko munculnya teguran dari sejumlah instansi yang berwenang.<sup>17</sup>

Dalam beberapa kasus praktek, pers Pancasila juga menjadikan sejumlah kaidah jurnalistik macam “*check and recheck*”, “*cover both side*” dan “*balancing reporting*,” bisa diartikan sebagai sebuah upaya “adu domba”, “menyudutkan pejabat tinggi” dan “upaya membongkar rahasia negara”.<sup>18</sup> Untuk mengeleminir kebohongan dan sumber resmi, umumnya pers Indonesia mencari suara lain dan kalangan akademisi atau pakar yang celaknya, tak jarang kondisi obyektifnya bukan hanya tak menguasai data tapi juga tak menguasai persoalan.

Jurnalisme omongan (*talking journalism*) yang lebih berorientasi pada pengejaran sumber-sumber pejabat tinggi negara dan militer sebagai dasar legitimasi “fakta kebenaran” berubah menjadi sebuah peresmian desas-desus, rumors dan mungkin juga cerita fiksi.<sup>19</sup> Di jaman Soeharto berkuasa, kalangan pejabat militer dan intelijen kerap melontarkan desas-desus dan tuduhan yang mengada-ada dengan tujuan untuk melegitimasi peran dan kehadiran militer. Dalam hal ini, contoh yang paling ekstrem adalah Peristiwa 27 Juli 1996. Saat itu, peristiwa yang sesungguhnya merupakan eksekusi dan penyerbuan aparat keamanan ke kantor PDI Pro Mega mengakibatkan kemarahan rakyat hingga mengamuk dan melakukan perusakan serta pembakaran gedung di sejumlah tempat di Jakarta dengan mudah diubah menjadi tanggungjawab tunggal kelompok Partai Rakyat Demokratik (PRD).

---

<sup>14</sup>Hal seperti ini terjadi berkali-kali selama Orde Baru, antara lain ketika Soeharto menerima penghargaan dari Badan Pangan Sedunia atas “keberhasilannya” memimpin bangsa Indonesia keluar dan ketergantungan import beras dan berhasil sukses berswasembada beras. Terakhir ketika Soeharto terkena serangan stroke pada akhir 1997.

<sup>15</sup>Dalam kajian teoritis, pencampuradukan dan perekayaan antara kepalsuan dan realitas ini dikenal sebagai *simulacra* atau hiper-realitas. Dan bahkan ada kecenderungan media di jaman Orde Baru bukan hanya menciptakan *simulacra* melalui ucapan pejabat, tapi juga telah menghadirkan wacana yang berkaitan dengan penciptaan pengetahuan palsu dan kebenaran semu di masyarakat yang lebih dikenal sebagai *pseudosophy*.

<sup>16</sup>Kepanjangan dari “buta aksara, buta huruf, buta angka”, namun oleh masyarakat diplesetkan menjadi “buta ijo, buta terong dan buta cakil”.

<sup>17</sup>Para era Orde Baru, redaksi media massa mendapat kontrol yang sangat kuat sehingga muncul sinyalemen bahwa dalam model pers Indonesia yang kondang disebut sebagai pers Pancasila, sesungguhnya pemimpin redaksi adalah bagian dari “otak” Departemen Penerangan dan Mabes ABRI jadi pusat seluruh kebijakan redaksional yang sesungguhnya.

<sup>18</sup>Pelajari kembali alasan pembredelan sejumlah media di masa Orde Baru, mulai dari *Indonesia Raya* hingga *Tempo*, *Editor* dan *DeTIK* pada 21 Juni 1994.

<sup>19</sup>Pada awal kekuasaan Orde Baru, Soeharto juga menggunakan dua media yang dikuasai tentara yaitu *Angkatan Bersenjata (The Army)* dan *Berita Yudha (War News)* untuk mengobarkan propaganda semangat anti-komunis dengan cara menyebarkan kebohongan tentang kekejaman dan penyiksaan yang dilakukan organ perempuan yang jadi *onderbouw* Partai Komunis Indonesia (PKI), Gerwani ketika membunuh “Tujuh Jendral Revolusi” satu persatu demi satu. Cerita tentang tarian telanjang “harum bunga”, pesta seks (*orgy*), penyiletan penis para jendral (*sado-masochist*) merupakan sebuah cara untuk menciptakan kebencian rakyat terhadap kelompok ini, yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan kemarahan “rakyat” yang berakibat (jadi alasan) terjadinya pembunuhan massal terhadap jutaan orang sepanjang tahun 1965-1968. Lihat: Stanley, “Penggambaran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan: Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka”, makalah yang disampaikan pada seminar Pra-Kipnas “Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih” yang diselenggarakan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) di Kampus Puspitex Serpong pada 8 September 1999.

Dalam Kasus 27 Juli, pers mengutip semua ucapan pejabat tinggi militer dan intelijen sebagai kebenaran. Tuduhan bahwa PRD adalah kelompok komunis yang militan, gerombolan setan gundul,<sup>20</sup> dan kelompok pengacau keamanan dilansir berbagai media tanpa memberikan kesempatan pada PRD dan keluarga aktivis PRD untuk membela diri. Hebatnya, dalam situasi seperti ini beberapa media mengutip ucapan Kasospol ABRI, Letjen TNI Syarwan Hamid, yang mengatakan, “Saya bisa tahu bahwa mereka itu komunis hanya dan mendengar cara mereka bernyanyi atau bersiul.”<sup>21</sup>

Media dan wartawan saat itu seperti bungkam saat menerima “pengarahan” dan kebohongan versi militer, meski di antara wartawan banyak yang jadi saksi bahwa pelaku penyerbuan kantor DPP PDI adalah pasukan militer. Yang agak keterlaluan adalah majalah *Gatra*,<sup>22</sup> yang bukan hanya sekadar menurunkan wawancara tapi menggunakan akses dan kedekatan dengan kelompok militer untuk membuka semua file pemeriksaan dan interogasi militer yang mempersepsikan PRD sebagai kelompok komunis yang berbahaya.<sup>23</sup>

### **Kewajiban Media**

Lantas bagaimana kewajiban pers dalam menyampaikan informasi yang jujur dan benar kepada masyarakat? Tidak gampang menjawabnya. Kebanyakan pers kita tergolong masih merupakan industri yang miskin, yang tak bisa mendanai para wartawannya untuk turun langsung ke lapangan. Banyak di antara laporan yang diturunkan media kita lebih merupakan kompilasi berita. Keadaan ini belum lagi ditambah kenyataan bahwa selama 33 tahun kita terlanjur menerima kebenaran bahwa sebaiknya pers memang tak usah memberitakan persoalan SARA. Padahal kita tahu bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, dan tugas wartawan adalah menyajikan fakta.

Memang, dalam masyarakat yang majemuk dan negara yang tengah dilanda krisis seperti negara-bangsa Indonesia sekarang ini masalah struktural (vertikal) yang menyangkut penghasilan (ekonomi), kedudukan sosial-politik, pendidikan dan lain-lain bisa tiba-tiba meledak dan berkembang menjadi masalah (horisontal) etnik, agama, asal kedaerahan, sikap perilaku dan sebagainya. Pers dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman masyarakat dan memulihkan keadaan. Maksud saya, pers di sini tak harus menjalankan fungsi pemerintah, tapi cukup mengikhtikarkan pemulihan keadaan menjadi lebih baik dan mengurangi pertumpahan darah dengan sebab-sebab sepele atau terkadang malah sering tak jelas.

Wartawan tentu saja harus punya kiat tersendiri untuk meliput peristiwa yang berhubungan dengan SARA. Melalui tulisannya, ia tak boleh “menyiramkan bensin dalam kobaran api”. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain dengan menunda detil kejadian dan menghindari membawa-bawa agama dan asal-usul etnis dalam kerusuhan biasa, apalagi yang hanya berdimensi “kriminal”. Sebuah peristiwa perkelabian antara pemuda Madura dan Dayak gara-gara rebutan

---

<sup>20</sup>Sebutan ini dilansir Soeharto kepada para wartawan dalam temu wicara pada 24 Juni 1996 di Jakarta saat menjelaskan tentang aktivitas “orang-orang PRD” yang memberikan dukungan kepada pendukung Megawati di Kantor PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta.

<sup>21</sup>Lihat: *Terbit dan Republika*, 1 Agustus 2000.

<sup>22</sup>Majalah ini dikelola Herry Komar dkk, mantan awak *Tempo* yang dibredel pada 21 Juni 1994. Kelompok ini dianggap para wartawan muda yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berkhianat, baik dari sisi komitmen maupun ideologis. Sejumlah kolumnis, dipimpin Dr Anief Budiman, pernah melancarkan gerakan boikot menulis dan membaca majalah *Gatra*. Pada Peristiwa 27 Juli, majalah ini menurunkan sejumlah tulisan yang bukan hanya menyudutkan tapi juga menyerang PRD dan Romo Sandyawan Sumardi SJ yang membantu menyelamatkan aktivis PRD. Seluruh bahan yang diturunkan sebagai liputan utama yang menyerang PRD bertumpu pada hasil interogasi (berdasar siksaan) aparat militer. Sejumlah wartawan mengecam model jurnalisisme yang dipraktikkan majalah ini dan menyebutnya sebagai “jurnalisisme intel”.

<sup>23</sup>Dari sejumlah penyidikan yang belakangan dilakukan Polri, terbukti adanya campur tangan langsung dan Kasospol Letjen TNI Syarwan Hamid, Pangab Jendral TNI Feisal Tangjung dan bahkan Presiden Soeharto serta petinggi militer dalam peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI 27 Juli 1996.

perempuan berpotensi akan menyebar menjadi perang antar suku begitu media memberitakannya secara berlebihan.

Apa yang bisa dilakukan wartawan untuk meredam sebuah pertikaian menjadi aksi perusahan SARA yang besar? Cara yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan menunda memberitakan detail kejadian yang sarat dengan unsur SARA, melakukan penghalusan dan mendahulukan kutipan pejabat.<sup>24</sup> Selain itu wartawan harus melakukan upaya *check* dan *rechecking*. Sebab menurunkan berita yang hanya berdasar “desas-desus” kerap lebih mengandung unsur dramatisasi yang melebihi fakta empiriknya. Untuk itu sangat diperlukan kemampuan mempraktekkan “ilmu” jurnalisme penyelidikan (*investigative journalism*).

Cara menghentikan ancaman amuk massal yang melibatkan dua pihak yang bertikai juga bisa dikurangi dengan cara mediamassa menurunkan pemberitaan yang menggambarkan penderitaan korban di kedua belah pihak. Taktik ini akan membuat setiap orang yang berniat meneruskan “pertikaian” dan “perangnya” jadi berpikir dua kali. Cara yang lain adalah “menggunting” dan membuang ke “tong sampah” semua kata yang berasal dari ucapan narasumber yang dilontarkan dengan emosional dan berpotensi mengobarkan kemarahan orang-orang yang berada di pihaknya maupun lawannya.

### **Ide Jurnalisme Damai**

Ide tentang jurnalisme damai sebetulnya berangkat dan kemuakan wartawan, akademisi dan masyarakat yang melihat bagaimana kelompok masyarakat menikmati liputan peperangan sebagai sebuah hiburan. Kemuakan ini muncul saat terjadi Amerika melakukan “Operasi Badai Gurun” dimana CNN membuat siaran langsung dan detik ke detik.

Saat itu semua media menokohkan Amerika sebagai polisi dunia dan memojokkan Saddam sebagai “cecunguk”. Seluruh kampanye negatif dijatuhkan atas diri Saddam yang dianggap sebagai penyebab dari perang tersebut. Padahal yang terjadi adalah ketidak-seimbangan posisi perang antara Irak melawan keroyokan pihak. Dalam sebuah kejadian Perang Teluk, serangan udara pihak Sekutu menjatuhkan sebuah bom dan membinasakan puluhan warga sipil Irak. Pihak Sekutu melancarkan tudingan bahwa pihaknya hanya menyerang sasaran militer dan tak pernah menyasar penduduk sipil. Sekutu menuduh Saddam sengaja menempatkan warga sipil Irak dalam bunker militer sebagai tameng dalam menghadapi ancaman Sekutu yang ingin melumpuhkan fasilitas persenjataan Irak. Namun pihak Irak menolak tudingan ini dan menyatakan bahwa yang dibom sekutu tak lain adalah tempat perlindungan yang dirancang pemerintah Irak bagi warga sipil. Mana yang benar?

Sekelompok orang yang galau melihat hal tersebut memunculkan upaya untuk melakukan *rethinking* atas nilai-nilai jurnalisme yang melihat konflik sebagai sebuah hal yang paling memiliki nilai berita. Upaya para wartawan senior tersebut kian dipicu oleh serangkaian ceramah pakar perdamaian, Profesor Dr Johan Galtung dalam sebuah kuliah sekolah musim panas di Taplow Court, Buckinghamshire, Inggris pada Agustus 1997.<sup>25</sup> Dalam perkuliahan yang dihadiri para wartawan, ilmuwan dan mahasiswa media dan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika tersebut berhasil dirumuskan antara lain pembedaan antara “ideologi” jurnalisme perang dan jurnalisme damai.

---

<sup>24</sup>Barangkali wartawan memang tertolong dengan kebiasaan pejabat Indonesia (warisan Orde Baru) yang terbiasa menyembunyikan fakta dan menutup-nutupi kenyataan dengan mengatakan “keadaan sudah terkendali”, “sudah aman”, “sudah pulih” dan seterusnya.

<sup>25</sup>Selain Profesor Johan Galtung, yang terlibat sebagai tenaga pengajar dan perkuliahan musim panas ini adalah Profesor Rune Ottosen, Profesor Wilhelm Kempf (Universitas Konstanz), Marty Gregory (dokumentator film), Par Younge (wakil editor *Here and Now*), Nick Pollard (kepala bagian pemberitaan *Sky TV*) Maggie O’Kane (wartawan *Guardian and C4*), Larry Hollingworth (UNHCR), Mick Hume (editor *LM Magazine*), Paddy Crean (Hon Sec), Sebastian Cody (editor *After Dark C4*).

**Tabel 1. Perbedaan Jurnalisme dan Jurnalisme Perang<sup>26</sup>**

	<b>Jurnalisme Damai</b>	<b>Jurnalisme perang</b>
<b>Penentuan Angle dan Fokus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada proses terjadinya konflik: pihak-pihak yang terlibat, penyebab pertikaian, permasalahan yang menyertai, berorientasi pada opsi “memang-menang”</li> <li>2. Ruang dan waktu yang terbuka; sebab-akibat dalam perspektif sejarah</li> <li>3. Memberikan konflik apa adanya</li> <li>4. Memberi ruang pada semua suara/versi; menampilkan empati dan pengertian</li> <li>5. Melihat konflik atau perang sebagai sebuah masalah, fokus pada hikmah konflik</li> <li>6. Melihat aspek humanisasi di semua sisi/pihak</li> <li>7. Pro-aktif: pencegahan sebelum konflik/perang terjadi</li> <li>8. Fokus pada dampak non-fisik kekerasan (trauma dan kemenangan, kerusakan pada struktur dan budaya masyarakat)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada arena konflik: dua kubu bertikai, hanya satu tujuan (kemenangan), situasi peperangan, orientasi “memang kalah”</li> <li>2. Ruang dan waktu tertutup; sebab-akibat terbatas arena konflik, mencari siapa yang menyerang duluan</li> <li>3. Ada fakta yang sengaja disembunyikan</li> <li>4. Berita memilahkan “kita-mereka”, nuansa propaganda, suara dari dan untuk “kita”</li> <li>5. Melihat “mereka” sebagai masalah, fokus pada siapa yang memang perang</li> <li>6. Dehumanisasi di pihak “mereka”, humanisasi dipihak “kita”</li> <li>7. Reaktif: Menunggu terjadi konflik, baru buat reportase</li> <li>8. Fokus hanya pada dampak fisik kekerasan (pembunuhan, luka, kerugian material)</li> </ol>
<b>Orientasi liputan</b>	Ketidak-benaran belah pihak, membongkar “cover up”	Hanya mengungkap ketidak-benaran “mereka” dan menutup-nutupi ketidak-benaran “kita”
<b>Cara Pandang Terhadap Akhir Konflik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada penderitaan semua: perempuan, anak-anak, orang tua; memberi suara pada korban</li> <li>2. Menyebut nama pelaku dalam kejahatan di kedua-belah pihak</li> <li>3. Fokus pada para penggiat perdamaian di tingkat akar rumput</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada penderitaan “kita”; memberi suara hanya pada panglima perang</li> <li>2. Menyebut nama pelaku kejahatan di pihak “mereka”</li> <li>3. Fokus pada pengiat perdamaian di tingkat elit</li> </ol>
<b>Pandangan Terhadap “Akhir” Konflik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdamaian = anti-kekerasan + hikmah</li> <li>2. Mengangkat inisiatif perdamaian dan mencegah perang lanjutan</li> <li>3. Fokus pada stuktur dan budaya masyarakat yang damai</li> <li>4. Usai konflik: resolusi, rekonstruksi dan rekonsiliasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdamaian = kemenangan + kencana senjata</li> <li>2. Menyembunyikan inisiatif perdamaian, sebelum kemamngan diraih</li> <li>3. Fokus pada pakta dan intitusi masyarakat yang terkendali</li> <li>4. Usai konflik: siap bertempur lagi bila “luka lama kambuh”</li> </ol>

Namun harus dimengerti bahwa Jurnalisme Perdamaian lahir di negeri Barat dan lebih merupakan inisiatif kelompok masyarakat, keprihatinan wartawan serta penggiat perdamaian dalam melihat dominasi Barat atas negeri-negeri non-Barat.

<sup>26</sup>Bahan ini diadaptasi dari lampiran pada *The Peace Journalism Option, Transcend Peace and Development Network*, 1998, hal. 44.

Di banyak negeri berkembang (baca: Negara Selatan), konflik kerap muncul akibat ketidakadilan dalam banyak hal. Mulai ekonomi, politik, sosial, kebudayaan hingga lebih akibat adanya dominasi kelas elit. Acapkali konflik merupakan bagian dari upaya bargaining position yang tak terakomodasi oleh sistem. Meliputi persoalan ini dengan kaca mata “jurnalisme perdamaian” semata tentu saja tak cocok untuk sepenuhnya diterapkan. jurnalis harus juga menyodorkan fakta dan bukti bukti yang berguna bagi perbaikan sistemik. Jurnalisme damai hanya bisa dilakukan bila ada upaya penguasa untuk menerapkan keadilan. Untuk itu barangkali jurnalisme perdamaian sebagai upaya penghentian aksi kekerasan dan eksisnya perlu dilengkapi perlu paradigma jurnalisme advokasi.

Jurnalisme advokasi sengaja dikembangkan kalangan aktivis dan wartawan di Indonesia sebagai Upaya untuk meninjau ulang kaidah-kaidah umum dalam ilmu jurnalistik yang lebih mengutamakan unsur keanehan, sensasi, konflik dan pertikaian sebagai sebuah isu yang seksi.

Ide jurnalisme advokasi dilatarbelakangi keadaan pers yang menyedihkan di masa Orde Baru. Antara lain terperangkapnya pers dalam paradigma “slogan” “Peta Pancasila” yang dikembangkan All Mutoyo dan Harmoko. Juga terjerumusnya pers pada jurnalisme pejabat (jurnalisme omongan) dimana pejabat yang karena nama besarnya dan legalitas jabatannya dianggap mewakili klaim atas seluruh kejadian dan kebenaran. Selain itu juga tersingkirnya para korban pembangunan dan pemberitaan nasional akibat “politik pembinaan pers” oleh sejumlah lembaga seperti Departemen Penerangan, Direktorat Jendral PPG, Ditsospol dan militer serta tersingkirnya peran kelompok jurnalis idealis dan aturan main baku redaksi akibat “ketakutan” pemilik modal (media) akan regulasi dan represi eksternal.

**Tabel 2. Perbedaan Pers “Umum” dengan Pers Advokasi**

	<b>Pers Umum</b>	<b>Pers Advokasi</b>
<b>Penitikberatan Berita</b>	Unsur sensasional, kontroversial, permasalahan banyak orang	Keseriusan permasalahan, tingkat kebrutalan pelanggaran HAM, ancaman terhadap kelompok minoritas dan <i>indigenus people</i>
<b>Model Pemberitaan</b>	Menekankan pada ketentuan “liputan berimbang”, kehati-hatian (terutama terhadap unsur SARA) dan konfirmasi dengan aparat yang berwenang	Menekankan pada unsur “kebenaran” yang didapat yang didapat berdasar hasil laporan investigasi. Dalam hal ini konfirmasi dari sumber yang “jelas akan menyangkal” bisa diletakkan sebagai prioritas terakhir
<b>Isu Yang Diangkat</b>	Masalah nasional yang genting, perang ditingkat internasional, wabah penyakit, ulah celebrities, hingga bingar dunia hiburan, keanehan warga/pejabat daerah dan lain-lain	Permasalahan orang kecil, pelanggaran HAM, terpinggirkannya hak sdi kelompok masyarakat, keberanian dan perlawanan rakyat kecil
<b>Narasumber Utama</b>	Tokoh yang punya nama besar, pejabat, selebritis	Para “korban”, rakyat kecil, kelompok minoritas, saksi mata, aktivis ornop dan kaum akademisi kritis
<b>Pioritas Kerja</b>	Membuat tulisan menjadi “berbicara tentang banyak hal” seperti layaknya sebuah videoklip	Memunculkan masalah pelanggaran negara terhadap “masyarakat” yang tak mampu bersuara ( <i>voiceless</i> )
<b>Asas Legalitas</b>	Menekankan pada tampilan formal wartawan dengan menunjukkan identitas seperti kartu pers, surat tugas,	Bila perlu menyamar seperti “intel” dan bahkan menyamarkan narasumber yang rawan terhadap ancaman represi dan

	kekuatan lobi dsb	penghilangan secara paksa
<b>Harapan Pasca Pemuatan</b>	Masyarakat terhibur, tahu permasalahan mutakhir dan bisa mengikuti trend isu atau gosip (mode, kesehatan, iptek dll) yang sedang jadi pemberitaan	Muncul perdebatan dan polemik masyarakat yang pada akhirnya akan berujung pada penguatan hak-hak rakyat, pemerintah bisa memperbaiki kebijakan dsb

### **Kendala Meliput**

Meliput masalah SARA di Indonesia tak mudah, karena setiap permasalahan yang berbaur SARA akan melibatkan emosi pada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Bayangkan misalkan Anda seorang wartawan asal Jawa beragama Islam harus meliput kerusuhan di Timor Timur. Dalam kerusuhan yang terjadi, penduduk Timor Timur yang beragama Katolik mencegat setiap orang berwajah Jawa dan memeriksa identitas. Bisa jadi Anda yang dapat tugas meliput kerusuhan itu Anda hanya akan menghasilkan laporan dan balik “kamar hotel” atau “kantor polisi”

Demikian seterusnya. Bila Anda seorang wartawan keturunan Cina, Anda akan kesulitan untuk terjun meliput langsung amuk semacam kerusuhan 13 -15 Mei 1998 di Jakarta. Kalau Anda orang Dayak atau Madura, Anda akan kesulitan membuat liputan yang “fair” tentang pertikaian Dayak Madura di Kalimantan Barat seperti yang terjadi pada Desember 1996- Januari 1997.

Dengan kata lain, di Indonesia, dimana orang belum menghargai *rule of the law* dan profesionalitas serta netralitas profesi, maka wartawan masih dicurigai dan selalu jadi korban. Baik akibat kecurigaan masyarakat maupun kesewenang-wenangan aparat keamanan. (Uraikan pengalaman Kompas meliput Kerusuhan Kalbar)

Untuk itu, seorang redaktur yang menugaskan wartawan untuk meliput SARA harus memiliki sejumlah kiat. Misalkan untuk meliput langsung kerusuhan Dayak-Madura, si redaktur bisa melakukannya dengan menunjuk dua orang reporter yang masing-masing bisa diterima di komunitas Dayak maupun komunitas Madura. Misalkan reporter yang satu orang Dayak atau orang Kristen, satunya orang Madura atau yang beragama Islam. Tapi belum selesai begitu saja. Anggap Saja, reporter yang bersangkutan akan membuat laporan yang menguntungkan kelompoknya masing-masing. Mereka akan memberikan empati sebanyak-banyaknya pada narasumber yang ditemuinya. Nah, tugaskan lagi seorang penulis senior yang dipercaya netralitasnya untuk mencampur dan memadukan dua laporan yang bertolak belakang itu menjadi satu tulisan yang utuh, dingin dan menyentuh setiap pembacanya agar segera mengakhiri perang sia-sia yang mereka lakukan.\*\*\*